

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua entitas yang ada di Indonesia membutuhkan yang namanya laporan keuangan, karena membutuhkan laporan keuangan saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam penyusunan laporan keuangan distandarisasi dengan satu pedoman yang dinamakan ISAK. Salah satu entitas yang harus menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK ialah entitas nonlaba. Pada bulan September 2018, DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi NonLaba” yang telah berlaku per 1 Januari 2020. ISAK 35 inilah yang sampai sekarang menjadi acuan baku bagi penyusunan laporan keuangan untuk entitas yang berorientasi non laba di Indonesia. (Gustani, 2021).

Salah satu entitas berorientasi non laba yang ada di Kecamatan Negara adalah Yayasan Panti Asuhan yang terdiri dari Yayasan Panti Asuhan Mahanaim, Yayasan Panti Asuhan Artha Kara Kumara, Yayasan Panti Asuhan Sabilal Muhtadin, Yayasan Panti Asuhan Yatama Al-Mustaqim, Yayasan Panti Asuhan Assalam Nusantara, dan Yayasan Panti Asuhan Priyahita. Yayasan Panti Asuhan ini memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya (Oktaviani, 2020).

Sebuah pengamatan awal telah dilakukan pada Yayasan Panti Asuhan yang masih aktif di Kecamatan Negara. Diperoleh fakta bahwa Yayasan Panti Asuhan yang masih aktif di Kecamatan Negara belum menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan hanya berbentuk laporan penerimaan dan pengeluaran serta realisasi anggaran yang masih sederhana. Ketika kemudian dilakukan konfirmasi berkaitan dengan ISAK 35, ditemukan indikasi minimnya pengetahuan para penyusun laporan keuangan atas standar penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba tersebut. Menurut Marlinah dan Ibrahim (2018), sebagai entitas yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya entitas nonlaba menjadi bagian entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika proses masuk dan keluarnya dana dalam entitas nonlaba sosial ini tidak diatur dengan baik, akan muncul kesan ditutupi yang menimbulkan tindak praktek korupsi. Pun, sebuah kasus berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan entitas juga sempat menyentil entitas nonlaba yang ada di Bali. Terdapat dugaan adanya penyalahgunaan dana bantuan hibah kegiatan perjalanan ziarah Wali Songo Bali-Jawa dan pengadaan pakaian seragam oleh oknum pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang beralamat di Denpasar. Dana tersebut bersumber dari APBD Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 200 juta. Saat pelaporan pertanggungjawaban, pelaku mempergunakan nota dan kwitansi fiktif (Bali Post, 6 September 2018).

Melihat betapa pentingnya peran laporan keuangan dalam entitas nonlaba, maka sudah seharusnya penyusunannya dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku umum. Standardisasi penyajian laporan keuangan menjadi penting, agar ada kesamaan ukuran dalam menilai kelayakan suatu laporan keuangan. Juga, agar laporan keuangan itu dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan berdaya banding tinggi. Sebuah Yayasan Panti Asuhan memerlukan adanya laporan keuangan dimaksud untuk menyediakan informasi yang relevan bagi para donatur, anggota organisasi, kreditor, pemerinah dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi Yayasan. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi entitas nonlaba, permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan tentunya harus lebih mendapat perhatian, mengingat sifat dan karakteristiknya yang cenderung lebih 'sederhana' dibandingkan entitas bisnis terutama dalam hal pencatatan transaksi keuangannya (Prayudi, 2015).

Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan entitas nonlaba oleh Yayasan Panti Asuhan, ternyata entitas nonlaba tersebut memiliki persepsi dan tingkat kepatuhan tersendiri. Oleh karena itu perlu diketahui dan dilihat sejauh mana tingkat kepatuhannya dan melihat persepsi dari sisi penyusun dan dari sisi pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi tingkat kepatuhan Yayasan Panti Asuhan di wilayah Kecamatan Negara dalam menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 serta untuk mengetahui persepsi para penyusun dan pengguna laporan keuangan atas penerapan standar tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan dan persepsi penyusun dan pengguna dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35, dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah variabel tingkat

kepatuhan penyusun, variabel persepsi penyusun, dan variabel persepsi pengguna. Variabel-variabel tersebut diambil dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian Desy Rustiyanti Rahayu, dkk, (2019) dan penelitian Aldyiansyah & Linda, (2018).

Tingkat kepatuhan penyusun merupakan ukuran besarnya intensitas kesesuaian tata cara dan sistematika penyajian laporan keuangan yang mengacu pada standar atau spesifikasi tertentu, dalam hal ini yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan. Penyusun dikatakan “patuh” jika dalam penyusunan laporannya sesuai dengan ISAK 35. Begitu sebaliknya, yayasan akan dikatakan “tidak patuh” apabila dalam penyusunan laporannya tidak mengacu pada standarisasi keuangan yaitu ISAK 35. Penelitian yang dilakukan oleh Aldyiansyah dan Linda (2018) pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf yang telah menguji sampai sejauh mana tingkat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, hasil penelitian menunjukkan tingkat penerapan PSAK 45 yang terkategori kurang baik. Tingkat kepatuhan penting diteliti untuk dapat mengetahui seberapa taat para penyusun dalam melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang telah distandarisasi dalam Interpretasi Standar Akuntansi Nomor 35. Standarisasi penyajian laporan keuangan menjadi penting, agar ada kesamaan ukuran dalam menilai kelayakan suatu laporan keuangan, maka dari itu diperlukannya variabel tingkat kepatuhan.

Persepsi adalah suatu kegiatan menafsirkan sesuatu objek yang ada di lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses adaptasi dan menghasilkan

pemahaman yang bersifat pribadi atas objek tersebut. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi penyusun laporan keuangan, merupakan suatu pandangan, sikap, dan penilaian oleh pembuat laporan keuangan (bendahara) terhadap isu penerapan Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35. Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan tentunya para penyusun laporan tersebut memiliki persepsi mengenai penerapan ISAK 35 yang digunakan di entitas terkait, apakah para penyusun setuju atau tidak dengan diterapkannya standarisasi tersebut. Penelitian sejenis dilakukan oleh Prayudi (2015) pada Palang Merang Indonesia (PMI) se-Provinsi Bali yang telah menguji sejauh mana persepsi para penyusun laporan keuangan dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, hasil penelitian menunjukkan para penyusun laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Bali memberikan persepsi yang kurang baik atau kurang setuju terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45). Persepsi penyusun penting diteliti untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan para penyusun terkait penerapan ISAK Nomor 35 dalam penyusunan laporan keuangan entitas nonlaba.

Persepsi yang kedua adalah persepsi pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan seperti pemerinah, donatur, karyawan, kreditor dan lain sebagainya memiliki pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, dimana nantinya para penyusun laporan keuangan setuju atau tidak dengan diterapkannya standarisasi tersebut. Penelitian sejenis dilakukan oleh Prayudi (2015) pada Palang Merang

Indonesia (PMI) se-Provinsi Bali yang telah menguji sejauh mana persepsi para pengguna laporan keuangan dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, hasil penelitian menunjukkan para pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Bali memberikan persepsi yang baik atau setuju terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45). Persepsi pengguna penting diteliti dikarenakan dalam menyikapi isu penerapan ISAK 35 menjadi penting mengingat bahwa sejatinya laporan keuangan merupakan mediator kepentingan di antara kedua belah pihak atas eksistensi entitas nonlaba.

Jika penyusun laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan menerapkan standar penyajian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, maka dipastikan tingkat kepatuhan Yayasan dalam menyusun laporan keuangan tinggi. Persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan atas penerapan ISAK 35 diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Akuntansi berkaitan dengan isu penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba di Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam hal objek penelitian yang digunakan, yaitu penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Selain itu terdapat persamaan variabel yang digunakan yaitu variabel tingkat kepatuhan. Variabel ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Aldyansyah dan Linda (2018), dan digunakan dalam penelitian ini karena dapat mengukur seberapa patuh para penyusun dalam menerapkan ISAK Nomor 35 dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kemudian membuatnya

berbeda adalah itu yang dibicarakan yaitu penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Dan juga dalam hal penentuan subjek penelitian, di mana dilakukan pada entitas nonlaba Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara. Alasan pemilihan subjek tersebut karena Yayasan Panti Asuhan yang ada di wilayah Kecamatan Negara merupakan salah satu entitas nonlaba yang memperoleh dana dari Pemerintah Kabupaten, selain itu karena Yayasan Panti Asuhan di wilayah Kecamatan Negara merupakan entitas nonlaba yang berskala kecil dimana dalam penyajian laporan keuangannya cenderung tidak diperhatikan secara serius ataupun teratur. Perbedaan lain yang utama adalah adanya perluasan topik dengan mengadopsi variabel persepsi para penyusun dan pengguna dari penelitian yang dilakukan oleh Prayudi (2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 (Studi pada Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Tuntutan akan akuntabilitas yang memadai untuk entitas berorientasi nonlaba khususnya yayasan panti asuhan bukanlah hal yang mudah. Keuangan yayasan panti asuhan sering dianggap sebagai dana sosial yang dipakai habis dalam pelayanan sehingga dalam pengelolaannya terkesan adanya pembiaran dalam penggunaan uang yayasan panti asuhan yang bisa menimbulkan praktek

korupsi. Terjadinya pembiaran ini karena tidak adanya manajemen keuangan yang baik dari pihak yayasan panti asuhan dalam hal ini kepala yayasan panti asuhan ataupun pemegang keuangan ataupun bendahara.

Selain itu sesuai konsep laporan keuangan yang merupakan alat komunikasi antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dan penyaji laporan keuangan dengan pihak lain sebagai pemakai laporan keuangan, terdapat satu elemen penting yang terlupakan, yaitu pihak pengguna laporan keuangan itu sendiri. Pihak pengguna laporan keuanganlah yang sebenarnya harus lebih diperhatikan berkaitan dengan kualitas penyajian sebuah laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Yayasan Panti Asuhan Bidang Sosial Kemanusiaan yang masih aktif di Kecamatan Negara dan telah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
2. Yayasan Panti Asuhan yang mempunyai data pelaporan keuangan yang lengkap pada periode tertentu (menyesuaikan dengan yang dibuat masing-masing yayasan).
3. Fokus tujuan penelitian ini adalah meneliti mengenai tingkat kepatuhan penyusun, persepsi penyusun, dan persepsi pengguna laporan keuangan terhadap penerapan ISAK 35.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaruh tingkat kepatuhan penyusun terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara?
- b. Bagaimanakah pengaruh persepsi penyusun terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara?
- c. Bagaimanakah pengaruh persepsi pengguna terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan penyusun terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penyusun terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pengguna terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan se-Kecamatan Negara.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk meneliti khususnya tentang penyusunan laporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba, dalam hal ini adalah Yayasan Panti Asuhan Se-Kecamatan Negara.
- b. Manfaat Praktis Penelitian:
 - a. Bagi subyek penelitian, dalam hal ini Yayasan Panti Asuhan Bidang Sosial Kemanusiaan di wilayah Kecamatan Negara, dapat memperoleh pengetahuan mengenai adanya standar pelaporan keuangan entitas nonlaba yaitu ISAK No. 35 serta memahami tingkat penerapan yang telah dilaksanakan. Entitas juga akan memperoleh informasi mengenai kebutuhan para pengguna laporan keuangan berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi organisasi.
 - b. Bagi donatur tetap maupun donatur tidak tetap yang telah memberikan sumbangan sukarela kepada Yayasan Panti Asuhan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi keuangan yang relevan sesuai dengan ISAK 35.
 - c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan Yayasan Panti Asuhan Se-Kecamatan Negara dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35.